ANALISIS PENDAPATAN DAERAH DALAM MEMBIAYAI BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Nama : Rizah Herdianingsih
NIM : 222015245

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

SKRIPSI

ANALISIS PENDAPATAN DAERAH DALAM MEMBIAYAI BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Nama : Rizah Herdianingsih
NIM : 222015245

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizah Herdianingsih

NIM : 22 2015 245

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2019

Penulis

Rizah Herdianingsih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Pendapatan Daerah dalam Membiayai Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nama	: Rizah Herdianingsih
NIM	: 22 2015 245
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Wellv, SE., M.Si	**Nina Sabrina, S.E., M.Si**
NIDN/NBM : 0212128102/1085022	**NIDN/NBM : 0216056801/851119**

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Prodi Akuntansi

Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

" Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu"

" Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan"

(Rizah Herdianingsih)

Dengan ridho ALLAH SWT
Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ***Mamaku Tersayang (Herdah)***
- ***Ayahku Tercinta (Hazir Effendi)***
- ***Adikku Tersayang (Artika Sari Devi)***
- ***Keluarga Besarku***
- ***Pembimbing Skripsiku***
- ***Teman Seperjuanganku***
- ***Almamater kebanggaanku***

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Analisis Pendapatan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Di era otonomi sekarang ini daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, salah satu tujuan implementasi otonomi daerah yaitu mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Umtuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasan dalam pembelanjaan APBD, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor perundang-undangan yang berlaku. APBD disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Hal itu terlihat dari besarnya penerimaan dan besarnya pengeluaran sehingga penting untuk menganalisis pendapatan daerah dalam membiyai belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan cara membandingkan anggaran dan realisasi kemudian menganalisis sesuai dengan permasalahan yang ada.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan dari banyak pihak. Penulis sampaikan terima kasih terutama kepada kedua orang tuaku yang tercinta dan terkasih mamaku Herdah dan ayahku Hazir Effendi, adikku tersayang Artika Sari Devi serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan do'a, memberikan materil dan motivasi selama menjalankan kuliah, memberikan dukungan agar tetap semangat dan tidak mudah menyerah ketika mengalami kesulitan dalam menghadapi situasi apapun. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Welly, S.E., M.Si dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan, motivasi serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakuitas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri, S.E., Ak., M.Si., CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si.,selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar Fakuitas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Surati staff akuntansi Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Keluarga Besarku yang selalu memberikan nasihat agar selalu semangat dan tak lupa berdoa agar diberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman seperjuangan ku dari semester 1 sampai dalam pengerjaan skripsi Alif Riung Alaganta, Baiti Jannati, Riki Ibrahim, Andri, M. Haris Sirajudin.
8. Teman-teman Kkn ku Evi, Wulan, Febrita.
9. Serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2019

Penulis

Rizah Herdianingsih

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN DEPAN/COVER i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN PRAKATA..... vii

HALAMAN DAFTAR ISI..... ix

HALAMAN DAFTAR TABEL xi

HALAMAN DAFTAR GAMBAR..... xii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN..... xiii

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN.....**1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah.....11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **13**

A. Landasan Teori 13
1. Pendapatan Daerah.....13
   a. Pengertian Pendapatan Daerah.....13
   b. Sumber Pendapatan Daerah 14
2. Belanja Daerah. 16
   a. Pengertian Belanja Daerah.....16
   b. Jenis Belanja 17

B. Penelitian Sebelumnya…….....19

BAB III METODE PENELITIAN **24**

A. Jenis Penelitian 23

B. Lokasi Penelitian.....24
C. Operasionalisasi Variabel 24
D. Data yang Diperlukan 24
E. Teknik Pengumpulan Data.....25
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....28

A. Hasil Penelitian 28
1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ...28
2. Visi dan Misi BPKAD Provinsi Sumatera selatan.....29
3. Stuktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan 32
4. Uraian tugas pokok dan fungsi.....33
B. Pembahasan Hasil Penelitian 67
1. Analisis Pendapatan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 98

A. Kesimpulan 98
B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel I.1 Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah..... 10

Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya..... 22

Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel..... 24

Tabel IV.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah 67

Tabel IV.2 Anggaran dan Realisasi PAD..... 69

Tabel IV.3 Pendapatan Asli Daerah..... 71

Tabel IV.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer 74

Tabel IV.5 Pendapatan Transfer..... 76

Tabel IV.6 Anggaran dan Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah 79

Tabel IV.7 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... 80

Tabel IV.8 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah 83

Tabel IV.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi 84

Tabel IV.10 Belanja Operasi..... 86

Tabel IV.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 89

Tabel IV.12 Belanja Modal 90

Tabel IV.13 Belanja Tak Terduga..... 94

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar I.1 Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah 10

Gambar IV.1 Struktur Organisasi 32

Gambar IV.2 Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah 68

Gambar IV.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 70

Gambar IV.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer..... 75

Gambar IV.5 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah. 79

Gambar IV.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah 83

Gambar IV.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi 85

Gambar IV.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal..... 89

Gambar IV.9 Belanja Tak Terduga 94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Persetujuan Skripsi

Lampiran 2 Plagiarism Checker X Originality Report

Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Fotocopy sertifikat AIK

Lampiran 6 Fotocopy Sertifikat Toefl

Lampiran 7 Biodata

ABSTRAK

Rizah Herdianingsih/222015245/2019/Analisis Pendapatan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan/Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah Pendapatan Daerah dalam Membiayai Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pendapatan Daerah dalam Membiayai Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian adalah penelitian deskiptif. Variabel yang digunakan adalah Pendapatan daerah dan Belanja Daerah. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan selama 5 tahun berturut-turut dari 2014-2018 bahwa pendapatan sudah dapat dikatakan baik karena selalu lebih besar dari belanja daerah karena selalu mengalami surplus, dari berbagai sumber pendapatan daerah maka pendapatan daerah dari tahun 2014-2018 dapat membiayai belanja daerah sebagaimana dengan kebutuhan daerah seperti belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

Kata kunci : pendapatan daeSrah, belanja daerah

Abstract

Rizah Herdianingsih/222015245/2019/An Analysis of Regional Revenues in Financing Regional Expenditures for the Province of South Sumatra/Public Sector Accounting

The formulation of the problem in this study was how regional revenues in financing regional expenditures for the province of South Sumatra. Purpose of this study was to analyze regional revenues in financing regional expenditures for the province of South Sumatra. Type of this study was descriptive research. Variables used were regional income and regional expenditure. Data used was primary data and secondary data. Data collection technique was documentation. Analytical method used was a qualitative analysis method. Result of this study indicated for 5 consecutive years from 2014-2018 that income could be said to be good because it was always greater than regional expenditure so that it always experienced a surplus, from various sources of regional income then regional income from 2014-2018 could finance regional expenditure as with regional needs such as operating expenses, capital expenditure and unexpected expenditure.

Keywords: Regional Income, Regional Expenditure

PENGESAHAN
NO. 523 /Abstract/LB/UMP/ VIII / 20 19
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era otonomi sekarang ini daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

UU No.32 Tahun 2003 menjelaskan pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dalam peraturan Daerah. Pengelolaaan keuangan daerah dimulai dengan penyusunan atau perencanaan APBD, yang kemudian disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara APBD disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu unsur APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Halim, 2014:101).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dalam desentraliasi.

Anggaran Daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menggambarkan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam operasionalisasinya, kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur APBD-nya.

PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Namun, dalam implementasinya banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari pendapatan pemerintah atau instansi lebih tinggi, hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dana untuk membiayai pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan keuangan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam membelanjai urusan rumah tangganya sendiri dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada didaerah tersebut.

PAD merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dalam mengatasi persoalan keuangan daerah tersebut salah satu kebijaksanaan pemerintah daerah adalah meningkatkan PAD. Tingginya pajak dan retribusi maka akan meningkatkan PAD, sehingga pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber PAD dan mengoptimalkan PAD khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah melalui PAD.

Strategi pemungutan dengan optimalisasi hasil adalah dengan melakukan intensfikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui penghitungan potensi dengan penyusunan sistem informasi basis data potensi dan ekstensifikasi atau penambahan jenis objek penerimaan pendapatan daerah ditujukan untuk mencari atau menggali potensi sumber-sumber baru penerimaan Pendapatan Daerah dan selanjutnya di Perda kan ke dalam bentuk Pajak dan Retribusi daerah serta jenis penerimaan daerah lainnya. Sehingga daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya agar dapat melaksanakan dan membiayai urusan rumah tangga daerahnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD ini dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. (Halim, 2014:101). Kemampuan

daerah untuk dapat membiayai keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya PAD yang meningkat dibandingkan dana perimbangan dari pusat. Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Gebriany (2013) yang berjudul Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung. Hasil penelitian diketahui kontribusi pajak dan retribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007-2011 sebesar 68,18% - 78,22% setiap tahun mengalami peningkatan dengan realisasi yang diperoleh mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Aprisilia (2015) yang berjudul Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pendapatan pemerintah Kota Tomohon dilihat dari analisis rasio keuangan, dalam hal ini derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah. Pemerintah Kota Tomohon belum mampu mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya, sehingga masih sangat tergantung pada bantuan pemerintah berupa dana transfer/dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Tahun 2016 di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan ditemukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terkesan asal-asalan. Sehingga hal tersebut berakibat pada pembengkakan kewajiban Pemprov Sumsel senilai Rp2.256.823.319.493. Hal ini dinilai publik sebagai tidak tercapainya target APBD sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dari

sini publik juga menilai bahwa ini adalah kelalaian Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dalam melakukan pengendalian atas defisit APBD dan penyusunan APBD yang terlalu optimis serta tidak memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Menurut publik hal ini diperlihatkan kinerja Gubernur dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2016 dinilai sangat buruk karena tidak menyusun APBD TA 2016 berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. (Sumber: Klikanggaran.com)

Gubernur Sumsel menyatakan, permasalahan pendapatan yang dihadapi Sumsel saat ini, sebagai akibat penurunan target dana perimbangan /transfer dari pemerintah pusat, dan tertundanya penyaluran sebagian dana tersebut sebagai tidak tercapainya target pendapatan pemerintah. Rancangan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2017 nanti, ditetapkan sebesar Rp7.899.161.790.677.00. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp489.25 miliar atau 6,60% dari APBD tahun anggaran 2016, dengan rincian pendapatan daerah pada APBD perubahan tahun anggaran 2016 sejumlah Rp7.375616.672.580.91, menjadi Rp7.874.161.790.677.00 pada APBD tahun anggaran 2017, meningkat sejumlah Rp498.545.118.096.09 atau naik 6,76%. “Selanjutnya, kita persilahkan DPRD Sumsel melakukan pembahasan Raperda ini untuk selanjutnya disempurnakan,” tukasnya. (Sumber: Fornews.co)

Ketua DPRD Sumsel mengatakan, menurunnya target dana perimbangan tersebut tentunya akan berpengaruh pula pada belanja daerah. "Terjadi pergeseran dan pengurangan dana kegiatan di belanja langsung SKPD.

Namun khususnya untuk pengurangan dana tersebut kepada SKPD dihimbau untuk tetap memprioritaskan program-program yang mendukung terhadap pencapaian target-target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)”. (Sumber: Sripoku.com)

Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sumsel mengatakan, kenaikan pada struktur APBD Perubahan ini berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Di mana pada saat APBD Induk baru dianggarkan 80%, seperti dana transfer dan dana insentif daerah. "Dari sisi belanja kami juga memasukkan DAK fisik dan nonfisik. Sebab, saat di APBD Induk lalu belum ada payung hukumnya berupa Perpres, sehingga disepakati baru dimasukkan ke APBD Perubahan," katanya. Pada APBD Perubahan tahun ini, kata dia juga dilakukan pengurangan target penerimaan PAD dari Rp.3,60 triliun menjadi Rp.3,44 triliun, berkurang Rp.158 miliar atau 4,39%. Pengurangan target PAD ini dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi target yang sebelumnya kurang signifikan, sehingga dengan target yang baru tersebut diharapkan dapat lebih efektif pencapaiannya. (Sumber: Bisnis.com)

Wakil Gubernur Sumsel membacakan pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel tahun anggaran 2015 dalam rapat paripurna DPRD Sumsel. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumsel didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel, para kepala dinas dan instansi dan para undangan. Laporan yang dibacakan menjelaskan gambaran pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud kinerja APBD dalam posisi unaudited atau belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurutnya, APBD perubahan (P) provinsi Sumsel tahun 2015 dari target pendapatan daerah provinsi Sumsel Rp6.883.873.903.633.09 sampai akhir 2015 terealisasi Rp5.869.535.074.636.95 atau 85,26 persen. Pendapatan tersebut berasal dari realisasi pendapatan asli daerah Rp2.413.637.425.440.20. Atau 84,04 persen dari target Rp 2.871.976.896.280.09 tidak terpenuhi target tersebut dikarenakan komponen pajak daerah yang dominan tidak tercapai targetnya adalah bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) yang disebabkan menurunnya jumlah pembelian kendaraan baru. Untuk dana perimbangan RP 2.329.728.331.330 atau 82,06 persen dari terget Rp 2.839.125.943.171.“Hampir secara keseluruhan dana bagi hasil pajak serta bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam dari pemerintah pusat realisasinya tidak tercapai,” katanya. Dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 1.126.169.317.866.75 atau 96,03 persen dari target Rp1.172.771.064.182. Sedangkan dari sisi belanja daerah terealisasi sebesar Rp 5.169.621.852.822.77 atau 80,12 persen dari di rencanakan Rp 6.452.618.624.475.55, hal ini disebabkan tidak terealisasinya beberapa target pendapatan daerah maupun pembiayaan daerah yang mengakibatkan beberapa kegiatan provinsi Sumsel ditunda pembayarannya. (Sumber: Beritapagi.co.id)

Menurut Gubenur untuk mencapai sasaran pembangunan jangka pendek dan jangka menengah, kebutuhan belanja daerah tentu bertambah besar. "Komposisi anggaran belanja daerah hingga saat ini masih didominasi oleh belanja wajib seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta berbagal jenis Belanja Hibah yang antara Iain untuk Bantuan Operasional

Sekolah dan Program Sekolah Gratis, Transfer dana untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pembayaran Hutang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota Tahun 2017 dan 2018," katanya. Untuk itu diminta kepada seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, agar mengelola APBD secara lebih efisien, efektif. transparan, dan akuntabel. "Dari sisi penerimaan kita harus mampu meningkatkan, menggali, dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar kapasitas fiskal kita meningkat," katanya. (Sumber: Sripoku.com)

Berikut ini disajikan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2013-2018.

Tabel I.1
Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

(Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi				
	Pendapatan	Total Belanja	Belanja		
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga
2013	5.468.139.691.033	5.678.703.610.531	4.699.990.031.504	862.903.668.426	582.299.000
2014	6.252.136.312.520	5.781.570.143.910	4.778.821.100.969	733.382.314.935	857.938.369
2015	5.990.424.062.511	4.497.889.160.889	3.455.829.230.120	1.041.021.930.768	1.038.000.000
2016	6.582.780.929.676	4.094.471.321.477	3.486.550.394.731	607.740.926.745	180.000.000
2017	8.195.968.131.799	5.788.552.526.667	4.410.337.692.244	1.377.382.678.423	792.256.000
2018	9.141.371.395.099	6.763.760.533.371	5.226.350.947.402	1.537.275.105.768	134.480.200

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2019

Gambar I.1

Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Selatan

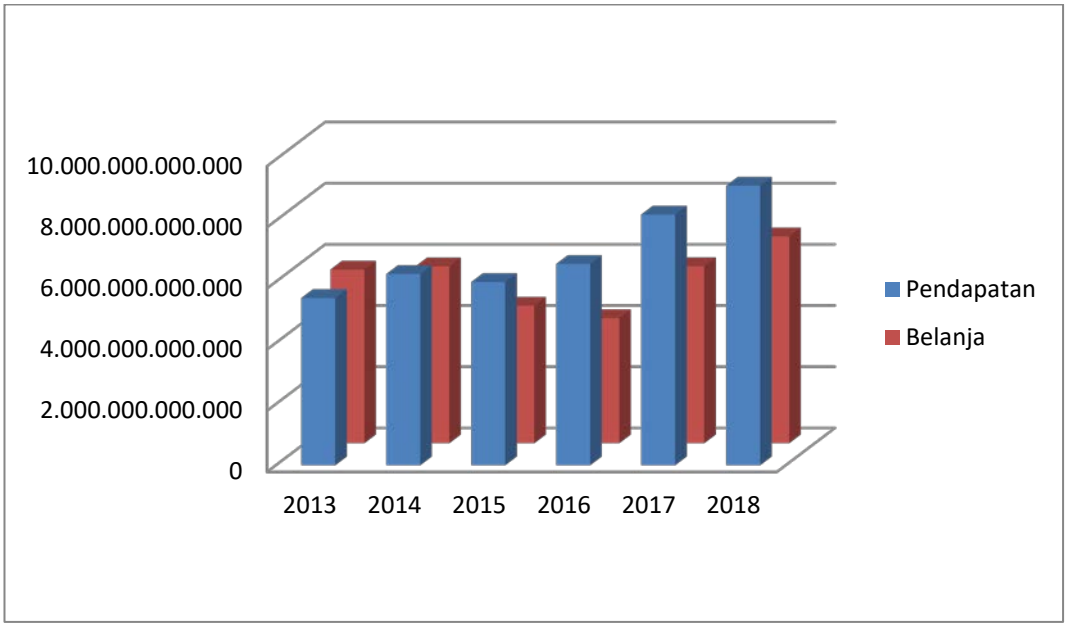

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2019

Grafik I.1 menunjukkan realisasi Pendapatan dan Belanja pada Provinsi Sumatera Selatan selama 6 tahun berturut-turut bahwa pada tahun 2014 Realisasi Pendapatan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tapi pada tahun 2015 mengalami penurunan sama halnya dengan belanja daerah dan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 realisasi pendapatan kembali mengalami kenaikan, sedangkan belanja daerah mangalami kenaikan selama 5 tahun hanya saja di tahun 2015 realisasi belanja mengalami penurunan hal ini disebabkan tidak terealisasinya beberapa target pendapatan daerah maupun pembiayaan daerah yang mengakibatkan beberapa kegiatan Provinsi Sumatera Selatan ditunda pembayarannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan membahas masalah ini lebih dalam lagi dengan penelitian yang berjudul **"Analisis Pendapatan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pendapatan Daerah dalam membiayai Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendapatan Daerah dalam membiayai Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat bagi penulis

   Meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yang sesuai dengan teori yang telah diperoleh dalam masa perkuliahan dan mewujudkannya dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

2. Manfaat bagi Pemda

   Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung yang digunakan dalam penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih luas mengenai bidang akuntansi sektor publik.

3. Manfaat bagi almamater

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Aprisilia Ristia Kaeng dan David P.E. Saerang. 2015. *Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon.* Volume.3. Hal. 958-965.

Fransiskus X.W Katit dan Sherly Pinatik. 2016. *Analisis Kinerja Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua*. Vol.4. Hal. 572-582.

Gebriany Pirade Wenur. 2013. *Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung.* Vol.1. Hal. 626-633.

Harry Al Makka, David P.E. Saerang dan Inggriani Elim. 2015. *Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu*. Vol.15. Hal. 324-333.

Julliet Angel Gozaliem. 2013. *Analisis Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Kota Bitung.* Vol.1. Hal. 2004-2013.

Luigi Laurens Derosario Berwulo, Vecky A.J Masinambow dan Patrick C. Wauran. 2017. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura.* Vol.17. Hal. 22-33.

Marchelino Daling. 2013. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Vol.1. Hal. 82-89.

Natalia Rawung. 2016. *Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatannya pada Dinas Kota Manado.* Vol.4. Hal. 496-502.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Penerbit Alfabeta, Bandung.